

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Rekrutmen**

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar.

Rekrutmen adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk mencari sumber daya manusia (*human resources*) guna dilibatkan dalam aktivitas partai politik, baik sebagai anggota, pengurus partai maupun untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Dari pengertian tersebut, ada dua dimensi dari rekrutmen yang bisa dilihat. *Pertama*, dimensi internal, yakni bahwa rekrutmen menyangkut soal bagaimana partai mencukupi ketersediaan sumber daya manusia guna keberlanjutan eksistensinya. *Kedua*, pada hakekatnya, partai politik lahir dan dikonstruksikan sebagai milik publik. Konsekuensinya, partai bertanggungjawab menyediakan ruang bagi publik luas untuk terlibat dalam aktivitas partai politik.

## **2.2. Alasan-Alasan Dasar Rekrutmen**

Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena memungkinkan adanya lowongan (vacancy) dengan beraneka ragam alasan, antara lain :

- 2.2.1. Berdirinya organisasi baru
- 2.2.2. Adanya perluasan kegiatan organisasi
- 2.2.3. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru
- 2.2.4. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain.
- 2.2.5. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif
- 2.2.6. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun
- 2.2.7. Adanya pekerja yang meninggal dunia

## **2.3. Rekrutmen dan Pengaruh Nilai**

Rekrutmen berkaitan dengan lingkungan, tidak hanya nilai-nilai, tetapi juga kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan ini. Di sektor publik, rekrutmen juga dipengaruhi oleh hukum.

Klinger dan Nalbandian dalam Faustino Cardoso Gomes (2003:106) menyatakan rekrutmen merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan menarik karena dalam praktek sangat dipengaruhi oleh tiga nilai utama, yang saling berbeda dan bahkan saling berlawanan satu sama lain, yang meliputi : (1) keadilan sosial (*social equity*), termasuk *affirmative action*; (2) efisiensi manajemen (*managerial efficiency*); dan (3) daya tanggap politik (*political responsiveness*).

Pendukung masing-masing dari ketiga nilai utama tersebut biasanya mempunyai tujuan dan cara yang saling berbeda dalam memandang dan mendekati proses rekrutmen. Adalah penting untuk memperhatikan nilai-nilai ini dalam praktek-praktek rekrutmen dari suatu lembaga tertentu, terutama di sektor publik. Tidak hanya nilai efisiensi manajemen dan daya tanggap politik saja yang mesti dipenuhi, tetapi proses rekrutmen juga harus dikaitkan dengan Affirmatif Action, yang sangat menekankan pentingnya perwakilan proporsional sebagai manifestasi dari nilai keadilan sosial. Dari perspektif nilai, terdapat perbedaan pandangan dari para pendukung nilai itu masing-masing terhadap *recruitment*.

#### **2.4. Rekrutmen Orang-Orang Yang Diangkat Secara Politik**

Rekrutmen tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan tenaga-tenaga operatif tetapi juga bagi tenaga pimpinan (eksekutif), atau ahli-ahli khusus. Ada tenaga-tenaga yang direkrut karena pertimbangan politik.

Sebelumnya perlu dibedakan antara *Classified Positions* dan *Exempt Positions*. *Classified Positions* biasanya diisi melalui mekanisme birokrasi, atau sistem pelayanan sipil. Oleh karena itu rekrutmen jenis ini sebenarnya lebih merupakan pemilihan berdasarkan karir/pengalaman kerja. Sedangkan *Exempt Positions* berada di luar dari pada mekanisme birokrasi, atau sistem pelayanan sipil tadi. Oleh karena itu posisi-posisi tipe ini biasanya diisi melalui apa yang dinamakan pemilihan secara politik. Jadi ada semacam pertimbangan politik bagi posisi-posisi tipe ini, sehingga dinamakan exempt (pengecualian). Mereka yang menduduki kedua jenis posisi ini biasanya mempunyai persepsi yang saling berbeda.

Orang-orang yang ditunjuk secara politik melihat pekerjaan pemerintah dengan berbagai perspektif dibandingkan dengan para administrator karir, antara lain:

- 2.3.1 Orang-orang yang dipilih secara politik biasanya orientasi dan kesetiiaannya ke atas kepada pejabat terpilih yang memilihnya. Mereka diperkenalkan kepada jabatan-jabatannya dikarenakan kesetiaan politik dan psikologis yang telah mereka berikan kepada pejabat yang terpilih.
- 2.3.2 Mereka biasanya tidak banyak mengetahui tentang struktur dan fungsi dari instansi pemerintahan yang mereka jalankan, walaupun mungkin penunjukan mereka didasarkan kepada latar belakang pengalaman yang dianggap berkaitan dengan posisi yang mereka duduki.
- 2.3.3 Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang juga dinggap berhasil dalam usaha-usahanya disektor swasta.
- 2.3.4 Orang-orang yang dipilih secara politik ini, dalam hal-hal tertentu mungkin melihat para birokrat karir sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya tanggap secara politik, termasuk loyalitas mereka terhadap program-program atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah terdahulu. Oleh karena itu para pejabat terpilih memandang proteksi-proteksinya pelayanan sipil sebagai *ret tape* (berbelit-belit) yang memelihara pegawai-pegawai yang tidak produktif pada pekerjaan-pekerjaan mereka.

Sebaliknya, secara mendasar, para birokrat karir dalam birokrasi memandang kelangsungan kebijaksanaan publik tergantung kepada mereka, dan melihat orang-orang yang dipilih secara politik tidak profesional.

## **2.5. Pengaruh Eksternal Terhadap Rekrutmen**

Jalannya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Terdapat tiga faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan praktek-praktek rekrutmen, terutama di sektor publik, yaitu (1) *economic conditions*, (2) *political factors* dan (3) peraturan-peraturan AA dan keputusan-keputusan pengadilan.

## **2.6. Teknik-Teknik Rekrutmen**

Teknik-teknik rekrutmen, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas desentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung kepada keadaan (besarnya) organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut.

### **2.6.1. Teknik rekrutmen yang desentralisasikan**

Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja juru ketik atau teknis bagi tipe kedudukan yang sama, rekrutmen yang desentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Jika rekrutmen desentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggungjawab untuk meminta dari para manajer akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja-pekerja baru yang dibutuhkan di waktu akan datang.

Dalam kenyataannya , proyeksi yang tepat mengenai kebutuhan-kebutuhan pembayaran baru tidak mudah karena beberapa hal, seperti :

- 2.5.1.1 Krisi politik atau pemotongan anggaran yang dapat secara drastis mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, dan karenanya berpengaruh terhadap kualitas daripada perkiraan.
- 2.5.1.2 Para Manager cenderung memperkirakan terlalu tinggi pekerja yang mereka butuhkan, hanya karena menurut pandangan mereka lebih baik mempunyai banyak pelamar dari pada terlalu sedikit. Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan dari instansi-instansi yang menangani manajemen sumber daya manusia di tingkat pusat untuk mengurangi biaya seleksi dengan cara mengurangi jumlah pelamar pada jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua posisi yang tersedia diisi dengan pelamar-pelamar yang berkualitas.
- 2.5.1.3. Posisi-posisi yang spesial membutuhkan sejumlah besar pelamar karena suatu persentase yang tinggi dari para pelamar mungkin ditolak oleh instansi yang menyeleksi karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan spesialisasi dari posisi tersebut, walaupun mereka memenuhi semua persyaratan masuk yang umum.

Atas pertimbangan-pertimbangan itu, instansi manajemen sumber daya manusia tingkat pusat akan mengeluarkan pengumuman perihal lowongan kerja yang tersedia. Untuk memenuhi peraturan perundangan Affirmative Action yang

menghendaki perwakilan proporsional maka setiap pengumuman pekerjaan harus memasukkan informasi seperti :

1. Jenis pekerja, klasifikasi dan besarnya gaji
2. Lokasi tugas (unit geografis dan organisasi)
3. Gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja
4. Kualifikasi minimal
5. Tanggal mulai kerja
6. Prosedur-prosedur pelamaran
7. Tanggal penutup bagi penerimaan pelamaran-pelamaran

Jika terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang tidak terwakilkan dalam suatu instansi tertentu, seperti kaum wanita, kaum minoritas, atau kelompok-kelompok lainnya, seperti ras, suku bangsa, daerah, maka rekrutmen membutuhkan waktu yang agak lama kalau memang rekrutmen itu ditargetkan untuk kelompok-kelompok tersebut.

### **2.6.2. Model Rekrutmen yang Desentralistik**

Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan-kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Selama masa resesi, di mana permintaan akan pekerjaan-pekerjaan

pemerintah meningkat tetapi lowongannya terbatas, maka penggunaan rekrutmen dengan cara ini lebih efektif.

Instansi-instansi secara sendiri-sendiri biasanya lebih memilih rekrutmen yang didesentralisasikan karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmennya. Hanya saja, kelemahannya, para pimpinan tingkat pusat akan kehilangan kendali mengenai apakah proses rekrutmen itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan nilai yang hendak diutamakan oleh AA atau tidak.

Beberapa instansi menggunakan kombinasi dari kedua jenis rekrutmen, baik yang disentralisasikan maupun yang didesentralisasikan. Berarti pengendaliannya menjadi lebih ketat, dan pada waktu bersamaan akan memberikan kepada instansi-instansi kesempatan melakukan rekrutmen yang lebih tepat waktu dan lebih fleksibel.

## **2.7. Regulasi Rekrutmen**

Kebutuhan rekrutmen dapat dipahami sebagai area pengakuan eksistensi masyarakat oleh partai politik. Partai politik adalah milik publik. Oleh karena itu, partai harus terbuka bagi setiap warga negara dan non diskriminatif baik atas nama agama, etnis, kekayaan, gender dan sebagainya. Selain itu, kedaulatan partai politik berada ditangan para anggotanya yang karenanya berhak menentukan kebijakan partai serta hak memilih dan dipilih dalam berbagai jabatan partai atau jabatan publik



(UU 31 Tahun 2002, Pasal 10 dan 11). Pengaturan kesemuanya ini harus ada dalam AD/ART partai. Dari sini bisa dilihat bahwa AD/ART menjadi pilar penting bagi bekerjanya demokratisasi dalam rekrutmen. Persoalannya, selama ini ketentuan-ketentuan rekrutmen yang diatur dalam AD/ART sifatnya terlalu umum atau bahkan sama saja dengan yang tertera dalam UU No. 31 Tahun 2002.

AD/ART butuh disusun untuk memberikan panduan batasan yang lebih dalam menunjukkan kualifikasi yang jelas bagi calon anggota baru, pengurus, dan calon yang akan dipromosikan dalam jabatan publik atau politik oleh partai

## **2.8. Basis-Basis Penentu Konsep Rekrutmen**

Ada 3 (tiga) basis pokok yang butuh dicermati guna memahami masing-masing karakteristik yang muncul dan sekaligus memiliki ruang transformasi bagi pencapaian demokrasi yang semakin matang bagi kehidupan internal partai, yakni, logika partai, tipe partai dan ideologi partai.

### **1. Logika Partai**

Logika partai yang dimaksud di sini berkenaan dengan bagaimana kecenderungan partai menempatkan posisinya dalam menjalankan fungsinya sebagai agen masyarakat untuk terlibat dalam kontestasi perebutan kekuasaan. Dua jenis logika utama dalam hal ini adalah logika representasi pendukung dan logika kompetisi partai.

## 2. Tipe Partai

Ada beberapa tipe yang menjadi kecenderungan dari partai politik namun pada dasarnya tipe partai politik hanya diperbedakan kedalam dua tipe utama yakni partai masa dan partai kader. Dan dalam perkembangannya kemudian muncul tipe *Cacth all*.

Tingkah laku partai masa sangat dipengaruhi oleh keinginan dan dinamika dari masa pendukungnya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kedalam sistem politik. Eksistensi ideal dari partai masa sangat ditentukan oleh besarnya pengaruh masa pendukungnya dalam menentukan arah partai disatu sisi dan kemampuan elit partai dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan masa pendukungnya.

Partai kader sangat dipengaruhi oleh keinginan dan dinamika dari elit/kader pendukungnya untuk memobilisasi dan mendapatkan dukungan masa bagi program-programnya atau untuk legitimasi kekuasaan. Sedangkan tipe partai *cacth all* muncul untuk mengatasi ketegangan diametris antara partai kader dan partai masa. Tingkah laku partai politik dengan tipe ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memenangkan pemilu.

Dalam realitas partai politik di Indonesia saat ini ada kecurigaan banyak partai politik menunjukkan kecenderungan untuk bergerak menuju partai kartel, atau setidaknya berorientasi menjadi partai kader.

Kristiadi menunjukkannya kedalam beberapa gejala berikut ini :

1. Partai merupakan bagian dari agen negara yang berhadapan dengan warga masyarakat dan bukan lagi sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan negara
  2. Partai memilhkan "menu" politik bagi pemilihnya, termasuk para calon anggota lembaga perwakilan.
  3. Partai sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
  4. Partai tidak mengandalkan loyalitas anggotanya. Akibat nya hubungan partai dengan konstituen menjadi longgar, kampanye lebih mengandalkan kemampuan menejerial dan efisiensi serta *capital intinsive* dibanding menggalang solidaritas masa.
  5. Partai tidak memiliki ediologi yang solid, tetapi lebih memperaktekkan pragmatisme politik.
  6. Peran kepengurusan partai dipusat semakin kuat, sementara kepengurusan didaerah semakin melemah.
3. Ideologi

Ideologi atau basis sosial partai disamping katagorisasi pembilahan seperti yang dilakukan oleh Geertz diata, ada pembilahan lain yang didasarkan para ideologi seperti yang pernah tumbuh dalam partai politik di Indonesia. Feith dan Castles mengklasifikasi beragam ideologi partai kontestan pemilu 1955 kedalam komunisme, tradisionalisme jawa, nasionalisme radikal, islam dan sosialisme demokrat. Jikapun berbagai ideologi ini kemudian hilang, menurut dhakidae bukanlah karena dasar-

dasar ideologi tersebut runtuh, namun lebih karena pemaksaan dari luar yang membuat ideologi tersebut tenggelam.

Ideologi dan identitas sosial bukanlah sekat identitas eksklusif bagi partai politik untuk menandai penegasannya atas yang lain. Ideologi partai politik atau keberagaman basis sosial yang ada justru dapat menjadi titik pijak dari partai politik untuk tampil lebih inklusif bagi kelompok basis sosial manapun.

### **2.9. Pola Rekrutmen**

Pola rekrutmen yang dimaksud adalah konstantasi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level praktis, kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.

Secara umum ada 4 (empat) pola dasar yang menjadi kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota, pengurus maupun pejabat politik.

**Tabel 1. Pola Rekrutmen Partai Politik**

Partisanship	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas kepada partai
Survival	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki sumber financial dan masa (dilakukan oleh partai pada saat momen pemilu)
Maritokratik	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu.
Kompartementalisme	Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan penguatan departemen-departemen yang dianggap strategis dalam organisasi.

Secara umum, pola rekrutmen partai politik di Indonesia cenderung bergerak kearah pola survival, yang mengandalkan uang dan massa sebagai sumberdaya utama. Akibatnya dalam beberapa halpartai politik di Indonesia kerap menemui kesulitan, misalnya soal ketiadaan atau kekurangan persediaan kader-kader partai yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengisi jabatan-jabatan publik (Erawan, Kompas com, 17/5/2005)

Namun demikian, sebenarnya proses pencampuran antara pola juga mungkin terjadi pada level internal partai. Maksudnya, tidak selalu sebuah partaikonsisten dengan satu pola perekrutan dalam setiap jenis rekrutmen. Ini karena menandakan setiap jenis rekrutmen adanya perbedaan persepsi terhadap strategi tidaknya suatu posisi atau jabatan tertentu. Ketiga jenis rekrutmen ini bisa kita andaikan berjenjang atau juga tidak.

Tantangan umum yang akan tampak nyata dalam pola rekrutmen ini adalah menstimbangkan antara kecenderungan oligarkhis dari elit atau faksi dominan dalam partai dengan faksi lainnya.

## **2.10. Partai Politik**

### **2.10.1. Pengertian Partai Politik**

Pada masa sekarang, partai politik merupakan sebuah gejala yang umum pada negara-negara modern. Pada awalnya partai politik lahir di Eropa, yaitu sebagai usaha dari kaum Aristokrat dalam parlemen, yang bertujuan mencari dukungan dari masyarakat<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya partai politik diadopsi oleh negara-negara baru, yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik. Partai politik merupakan fenomena modern yang munculnya berbarengan dengan perkembangan demokrasi modern (kelembagaan). Disini partai politik berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat, berperan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik juga berperan sebagai organisasi yang berhak membentuk pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut bekerja tergantung dari banyak faktor dan salah satunya adalah sejarah berdirinya partai politik.

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana, 1992, hal.113

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di sini perbedaan terpenting sejarah kepartaian di Indonesia dengan negara-negara Eropa Barat terletak pada relasi kekuasaan negara dan rakyatnya. Pluralisme yang mengakar demikian kuat di Barat membentuk watak dan karakter kekuasaan yang menyebar dikalangan rakyatnya. Negara, yang tidak mempunyai tujuan dan ideologi untuk dirinya sendiri, memainkan peran sebagai penengah dalam kompetisi antar kelompok-kelompok kepentingan. Setiap kelompok memiliki hak untuk mendirikan partai dan menentukan program politik dan ekonominya sendiri. Di Indonesia, sekurangnya pada masa Orde Baru, negara memainkan peran yang sangat sentral, negara memiliki program, tujuan dan ideologi politiknya sendiri. partai hanya menjadi kendaraan orang-orang yang mempresentasikan diri sebagai bagian negara. Pemilu diadakan sebagai prasyarat politik bantuan luar negeri, demikian pula “partai-partai alternatif” memperoleh hak hidup tetapi ruangnya sangat terbatas. pemilu selama Orde Baru tidak jujur, bebas, adil dan *fair*.<sup>2</sup>

Secara umum ada banyak sekali definisi tentang partai politik. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan

---

<sup>2</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang, 2003, hal. 126.

perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkan dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>3</sup>

Partai politik, menurut Haryanto, pada hakekatnya merupakan sekelompok warganegara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Riswandha Imawan definisi partai politik yang cocok dengan setting politik Indonesia adalah dari devinisi Giovanni Sartori. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah: *“any political group identified by an official label that present at election and is capable of placing trough election (free and non free ) candidates for public offices”*. ( adalah segala macam bentuk kelompok politik

---

<sup>3</sup> Sigmund Neumann, *“Modern Political Parties”*, *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Herry E. Eckstein dan Devid E. Epter, (London: The Free Press of Gloenco, 1963), hal.352. dalam Miriam Budiardjo *“Partisipasi dan Partai Politik”*, PT Gramedia Jakarta, 1982, hal 14.

<sup>4</sup> Haryanto, *Sistem Politik, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.88.



yang ditandai oleh adanya label resmi yang mengikuti pemilu baik yang bebas atau tidak dan mampu menempatkan calon-calon mereka pada kantor resmi pemerintahan.)<sup>5</sup>

### **2.10.2. Tipologi Partai Politik**

Ada banyak sekali tipologi partai politik. Jika kita melihat organisasi internal dari partai-partai politik,<sup>6</sup> maka terdapat dua klasifikasi partai;

1. Partai-partai elit atau sering disebut sebagai partai-partai tradisional. Partai jenis ini lebih menekankan pada mendapatkan dukungan dari orang-orang terkemuka, mereka lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas. Warganegara berkualitas dicari karena prestise mereka, yang akan memberikan pengaruh moral atau partai
2. Partai Massa. Jenis ini lebih memprioritaskan jumlah kuantitas pemilih dari pada kualitas anggota. Pada partai tipe Massa, para calon tidak dipilih oleh komite-komite kecil, maka suatu perwakilan dari para anggota diorganisir secara demokratis, pada kongres-kongres partai lokal atau kongres partai nasional.

Selain tipologi diatas maka partai politik juga bisa diidentifikasi berdasarkan pada basis sosial dan tujuan. Almond telah menggolongkan partai

---

<sup>5</sup> Riswandha Imawan : *Isu-Isu Politik Dekade 1990-an dan pengaruhnya terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1991, h.2.

<sup>6</sup> Penulis mendapatkan tipologi organisasi internal kepartaian dari kuliah '*Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*' yang diampu oleh Prof. DR.Riswanda Imawan.

politik berdasarkan atas basis sosial dan tujuan. Menurut basis sosialnya partai politik dibagi menjadi empat tipe. Pertama, partai politik dengan basis sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, golongan bawah. Kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu., seperti kaum buruh, petani, pengusaha. Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katholik, Hindu. Keempat, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, daerah tertentu. Namun dalam kebanyakan kasus sebuah partai tidak hanya memiliki satu jenis basis sosial, tetapi merupakan kumpulan dari berbagai kalangan, dengan satu atau dua kelompok yang dominan. Contohnya adalah Partai demokrat di Amerika yang berisi kelas bawah, kulit hitam dan katolik, hal ini tidak berarti bahwa pendukungnya tidak ada yang berasal dari kelas atas, kulit putih dan protestan.<sup>7</sup>

Sedangkan berdasarkan tujuan, maka partai politik dibagi menjadi tiga. Pertama Partai Perwakilan Kelompok, artinya, partai yang menghimpun berbagai kelompok dalam masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. Seperti Barisan Nasional di Malaysia. Kedua adalah partai politik Pembinaan Bangsa, artinya partai ini bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit, seperti seperti Partai Aksi Rakyat Singapura. Ketiga partai Mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, op, cit, hal.123-124

ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat. Contohnya adalah partai Komunis.

### **2.10.3 Fungsi Partai Politik**

Menurut Roy C. Macridis partai politik berfungsi sebagai representasi, konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah.<sup>8</sup> Membuat Pertimbangan, Perumusan Kebijakan dan Kontrol terhadap Pemerintah. Para anggota mencapai persetujuan tentang tujuan-tujuan utama partai dan sebelumnya mereka mempunyai kesempatan untuk memperdebatkannya.<sup>9</sup>

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik juga mempunyai fungsi politik sebagai berikut:

#### **1. Partai sebagai sarana komunikasi**

Salah satu tugas dari partai politik adalah sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. di dalam masyarakat modern pendapat atau aspirasi seseorang maupun kelompok akan hilang bila apabila

---

<sup>8</sup> Roy C. Macridis, *sejarah fungsi dan tipologi partai politik* dalam Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996, hal.26.

<sup>9</sup> Ichlasul Amal, *op, cit*, hal. 26-29

tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation) pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan proses perumusan kepentingan (interest articulation) yang mana kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan partai politik. Hasil perumusan kepentingan tersebut kemudian di jadikan sebagai input pembuatan program kerja yang akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah kebijakan publik.

Dilain pihak partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan demikian partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah antara pemerintah dengan warga masyarakat.

Didalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) kadang kadang partai politik bagi pemerintah dikatakan sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara.

## **2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization)**

Di dalam ilmu politik sosialisasi diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas

mungkin, untuk itu partai berusaha untuk menciptakan sebuah “*image*” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Disamping menanamkan solidaritas di dalam partai , partai juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional.

### **3. Partai sebagai rekrutmen politik**

Partai juga berfungsi untuk mengajak dan merekrut orang untuk yang berkompoten untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Dalam rekrutmen mereka mengusahakan menarik kader-kader muda untuk dipersiapkan menjadi pengganti dimasa mendatang.

### **4. Partai politik sebagai sarana untuk pengatur konflik (conflict management)**

Dalam demokrasi perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar, karena itulah keindahan sebuah demokrasi, terkadang dalam sebuah perbedaan akan memunculkan sebuah konflik maka disitulah partai berperan untuk mengatasinya. Namun dalam prakteknya fungsi ini tidak dilakukan sebagai mana fungsinya . misalnya informasi yang diberikan justru memberikan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional melainkan kepentingan partai dengan akibat pengotakan politik sehingga konflik tidak diselesaikan malah dipertajam.

Selain keempat fungsi diatas Surbaki menambahkan fungsi partai politik sbb:  
1) pemandu kepentingan, 2). Partisipasi politik, 3). Kontrol politik.oleh karena itu partai sangat bermanfaat menurut Lance castles yakni sebagai sarana rekrutmen, oposisi, kompetisi, dan alternasi bagi negara modern yang demokratis. Tetapi partai juga bisamenjadi kutukan bagi masyarakat jika ia menjadi alat untuk mobilisasi rakyat demikepentingan penguasa. Inilah yang disebut sebagai totalitarianisme.

Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan tersebut dapat mrmpengarui serta melaksanakan kebijakan. Kekuasaan diperoleh jika mendapat dukungan dari rakyat melalui perolehan suara mayoritas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadappartai semakin menguat merupakan bagian dari komunikasi vertikal antara pemerintahan dan masyarakat